

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Kuningan Tahun 2021)

The Effect Of Modernization Of The Tax Administration System, Moral Obligations And Level Of Tax Payer Education To Tax Payer Compliance (Case Study On Non-Employee Private Taxpayers In Kpp Pratama Kuningan In 2021)

Virgian Mulya Pratama¹, Kurnia²

Program Studi Auntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

¹virgianmp@student.telkomuniversity.ac.id, ²kurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk penerimaan kas negara, pajak merupakan iuran yang asalnya dari warga untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung bagi warga tersebut, tujuannya untuk menyejahterakan warganya. Dengan adanya peristiwa tidak konsistennya penerimaan pajak di Indonesia, maka kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban wajib pajak yang berlaku, tentunya sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan, kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bersifat studi kasus dan termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kuningan dengan sampel wajib pajak orang pribadi non karyawan sebanyak 99 wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer yang berupa kuesioner dengan skala likert 1-5 sebagai metode pengumpulan dan data sekunder. Data analisis yang digunakan adalah dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Abstract

Taxes have a very important role for state treasury receipts, taxes are contributions that originate from citizens for the state treasury which are coercive in nature without any direct compensation for the citizens, the aim is to improve the welfare of its citizens. With the occurrence of inconsistent tax revenue events in Indonesia, discipline and public awareness to comply with applicable taxpayer obligations are of course very much needed. This study aims to determine how the modernization of the tax administration system, moral obligations and education level of individual non-employee taxpayers registered at KPP Pratama Kuningan. This research is a descriptive research with a case study character and is included in quantitative research. This research was conducted at KPP Pratama Kuningan with a sample of 99 individual non-employee taxpayers. The data used are primary data in the form of a questionnaire with a Likert scale of 1-5 as a collection method and secondary data. The data analysis used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing The results of this study prove that the modernization of the tax administration system, moral obligations and education level of taxpayers simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, the variables of moral obligation and education level of taxpayers partially have a positive significant effect on taxpayer compliance. However, the modernization of the tax administration system partially does not have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Modernization of the Tax Administration System, Moral Obligations, Education Level of Taxpayers, Taxpayer Compliance, Non-Employee Individual Taxpayers

I. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk penerimaan kas negara, pajak merupakan iuran yang asalnya dari warga untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung bagi warga tersebut, tujuannya untuk menyejahterakan warganya. Menurut (Mardiasmo, 2018:4), pajak mempunyai fungsi anggaran (Budgetair) dan fungsi mengatur (Regulerend). Fungsi anggaran (Budgetair) ialah sebagai sumber pendapatan negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgetair. Di Indonesia pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN).

Dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak, terdapat 2 jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formil dan kepatuhan materil. Kepatuhan dalam penelitian ini termasuk Kepatuhan pada penelitian ini termasuk ke dalam kepatuhan formil dan kepatuhan materil. Kepatuhan Formil ialah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formil menurut undang-undang perpajakan yang berlaku seperti wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajak terhutangnya secara tepat waktu. Sedangkan Kepatuhan Materil ialah keadaan dimana wajib pajak memenuhi syarat material dengan mengisi SPT tahunan secara lengkap dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian SPT disampaikan kepada KPP Pratama dengan tepat waktu atau sebelum batas waktu berakhir.

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Kuningan karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara KPP Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon yang menyatakan bahwa jumlah rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Cirebon lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Kuningan. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih KPP Pratama Kuningan sebagai objek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Kuningan. Penelitian ini penting dilakukan karena masih adanya keberagaman dengan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga hal tersebut memotivasi dilakukannya penelitian ini lebih lanjut guna mendapatkan hasil yang diinginkan dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak dan sebagai masukan dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan modernisasi sistem administrasi perpajakan, kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “pengaruh modernisasi sistem administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan, kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan, serta bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak secara simultan maupun secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Kuningan.

II. TEORI LITERATUR

A. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Dengan adanya peristiwa tidak konsistennya penerimaan pajak di Indonesia, maka kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban wajib pajak yang berlaku, tentunya sangat dibutuhkan. Jika wajib pajak bertindak tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan menimbulkan tindakan pelanggaran atau pelalaian perpajakan yang akan merugikan negara dan akan berkurangnya penerimaan pajak negara. Pemerintah seharusnya menumbuhkan sikap kepatuhan terhadap wajib pajak dengan melakukan sosialisasi tentang perpajakan guna menumbuhkan kewajiban moral yang ada pada diri wajib pajak. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau wajib pajak pun harus menyesuaikan dengan zaman agar memberikan kemudahan akses ataupun pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin banyak pula pengetahuan dan kesadaran dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari: Aspek Yuridis, Aspek Psikologis dan Aspek Sosiologis

B. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan zaman tentang perpajakan yang berlangsung hingga saat ini dan terus dilakukannya perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara lewat pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Dilihat Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan stabil sebagai salah satu pilar kokoh sebagai fundamental penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem administrasi, efektivitas pengawasan proses bisnis dan sumber daya manusia profesional.

C. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kewajiban moral adalah perilaku yang dimiliki seseorang namun tidak semua orang memiliki perilaku yang sama seperti etika, prinsip hidup dan rasa bersalah yang nantinya akan mendorong seseorang tersebut secara sukarela untuk membayar pajak. Seharusnya sebagai masyarakat yang baik harus sadar dan sebagai warga negara yang baik yang memegang teguh Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, maka dengan adanya kewajiban moral maka mendorong seseorang untuk patuh dalam melaporkan pajaknya. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk kewajiban moral adalah melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup.

D. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan adalah usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat. Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah jenjang yang ditempuh dalam upaya proses pengajaran dan pelatihan upaya untuk mendapatkan pengajaran dan pelatihan yang lebih baik.

Tingkat pendidikan adalah jenjang yang ditempuh dalam upaya proses pengajaran dan pelatihan upaya untuk mendapatkan pengajaran dan pelatihan yang lebih baik. Apabila tingkat pendidikan wajib pajak itu rendah, maka kemungkinannya wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya pun akan kurang baik sehingga wajib pajak itu kurang patuh. Kurangnya sosialisasi juga mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan kewajiban moral sebagai wajib pajak yang patuh untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu pun rendah. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk tingkat pendidikan wajib pajak adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal.

E. Pengaruh *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan seperti dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya. Selain itu modernisasi administrasi pajak dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust*), dan meningkatkan integritas aparat pajak. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Darmayasa & Setiawan, 2016) dan (Aryati & Putrianti, 2016) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

F. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya kewajiban moral, etika, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan karena pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara. Maka dengan adanya kewajiban moral akan mendorong seseorang untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin baik kewajiban moral seorang wajib pajak maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Artha & Setiawan, 2016) dan (Yustina et al., 2020) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

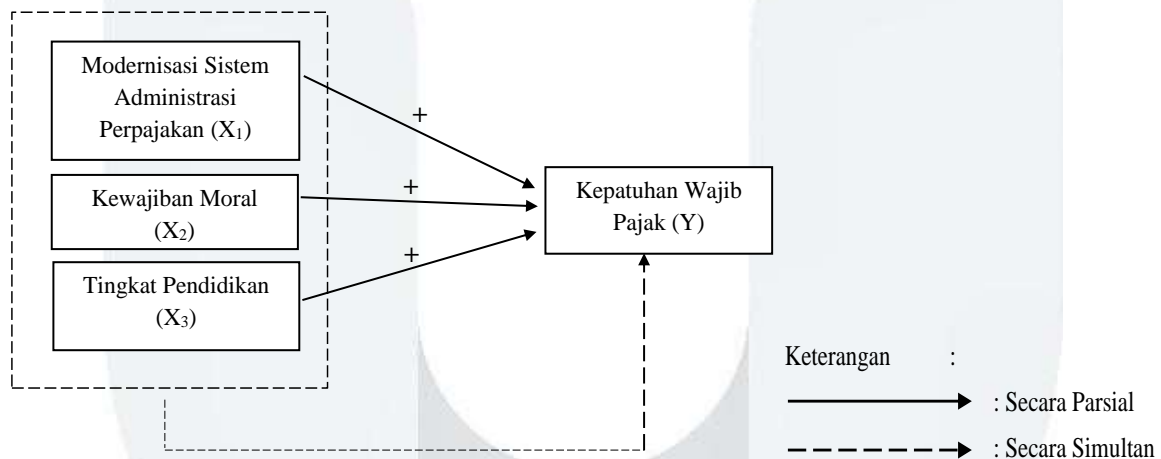
H2: Kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

G. Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerap Tingkat Pendidikan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan jika individu yang memiliki tingkat pendidikan yang baik pada wajib pajak tersebut mengenai perpajakannya maka wajib pajak akan sadar pada kewajiban dalam membayar serta melapor pajaknya. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi juga akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Yustina et al, 2020) dan (Yosi et al, 2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Tingkat pendidikan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Kuningan tahun 2021 yang berjumlah 99. Dalam penelitian ini digunakan teknik *non probability sampling* dengan jenis *convenience sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X2 = Kewajiban Moral

X3 = Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

e = Kesalahan regresi/error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Nilai Maksimum	Total Skor	Persentase	Kategori
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	99	3465	2793	80.6%	Baik
Kewajiban Moral	99	1980	1712	86.4%	Sangat baik
Tingkat Pendidikan WP	99	2970	2400	80,8%	Baik
Kepatuhan Wajib Pajak	99	4455	3670	82,3%	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2021)

B. Uji Normalitas

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan uji statistik non parametrik Kolmogorovv-Smirnov (K-S) dengan bantuan software IBM SPSS 25.

Tabel 2 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,1232981
	Std. Deviation	4,13822194
Most Extreme Differences	Absolute	0,077
	Positive	0,053
	Negative	-0,077
Test Statistic		0,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.168 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, hasil uji normalitas yang menggunakan metode non-parametrik One-Sample (K-S) mempunyai nilai Asymp. Sig lebih dari 0.05 yaitu senilai 0.168, dengan begitu pada uji normalitas nilai residual berdistribusi normal.

C. Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

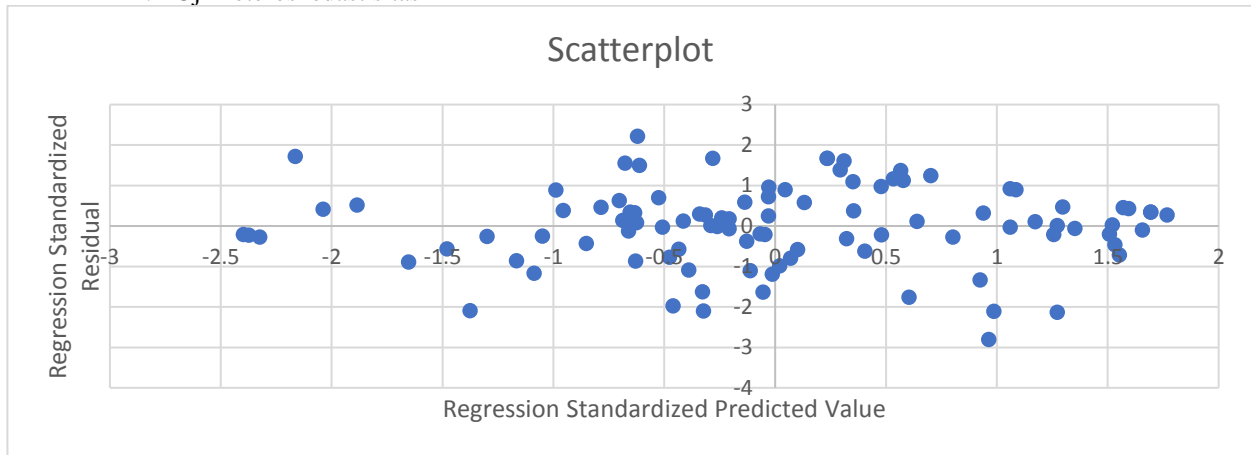
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,703	4,627		1,665	0,099		
	TOTAL_MS	-0,095	0,107	-0,067	-0,891	0,375	0,995	1,005
	TOTAL_KM	0,809	0,212	0,316	3,813	0,000	0,821	1,218
	TOTAL_TP	0,745	0,128	0,484	5,826	0,000	0,819	1,222

a. Dependent Variable: TOTAL_KW

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian multikolinearitas memiliki nilai tolerance >0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) <10, pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai tolerance senilai 0.995 dan untuk Variance Inflation Factor (VIF) senilai 1.005, variabel kewajiban moral memiliki nilai tolerance senilai 0.821 dan untuk Variance Inflation Factor (VIF) senilai 1.218 dan variabel tingkat pendidikan wajib pajak memiliki nilai tolerance senilai 0.819 dan untuk Variance Inflation Factor (VIF) senilai 1.222. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi.

D. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tersebut, dapat dilihat pada grafik *scatterplot* bahwa titik-titik data menyebar secara acak lalu titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

E. Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi ialah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test), yaitu dengan membandingkan antara nilai hitung Durbin Watson (d) dan nilai tabel Durbin Watson dengan memperhatikan batas atas (dU) serta batas bawah (dL). Jika pada hasil nilai Durbin Watson antara nilai batas atas (dU) maka tidak terjadi autokorelasi dan nilai dU juga dL dapat dilihat di tabel Durbin Watson. Untuk membuktikan terdapat autokorelasi atau tidak dapat dilakukan dengan melihat hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.680 ^a	0,463	0,446	4,199	1,834

a. Predictors: (Constant), TP, MS, KM

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Jika dilihat dari rumus yaitu $dU < d < 4-dU$ maka perhitungannya $1.735 < 1.834 < 2.265$ artinya dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian autokorelasi jika hipotesis nol diterima dan tidak terdapat autokorelasi.

F. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 7.703 - 0.095 MS + 0.809 KM + 0.745 TP + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Konstanta α sebesar 7.703 dengan nilai *Sig* sebesar 0.099 lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Maka dinyatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1), kewajiban moral (X_2) dan tingkat pendidikan wajib pajak (X_3) bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 7.703 (konstan) artinya tanpa ada variabel lain yang mempengaruhi, wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk patuh.
- Nilai koefisien regresi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan senilai -0.095, hal tersebut dinyatakan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar -0.095 jika variabel independen lainnya tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel kewajiban moral senilai 0.809, hal tersebut dinyatakan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel kewajiban moral, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0.809 jika variabel independen lainnya tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan wajib pajak senilai 0.745, hal tersebut dinyatakan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel tingkat pendidikan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0.745 jika variabel independen lainnya tetap.

G. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	0,463	0,446	4,199

a. Predictors: (Constant), TOTAL_TP, TOTAL_MS, TOTAL_KM

b. Dependent Variable: TOTAL_KW

Sumber: data diolah IBM SPSS 2

Berdasarkan hasil pada tabel membuktikan bahwa hasil uji koefisien determinasi pada nilai *Adjusted R Square* senilai 0.446 atau sebesar 44.6%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 44.6% oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak. Sedangkan 55.4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain variabel yang ada pada penelitian ini.

H. Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 6 Hasil Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1441,807	3	480,602	27,263	.000 ^b
	Residual	1674,698	95	17,628		
	Total	3116,505	98			

a. Dependent Variable: TOTAL_KW

b. Predictors: (Constant), TOTAL_TP, TOTAL_MS, TOTAL_KM

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0.000 maka nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa H_a diterima serta H_0 ditolak maka variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Kuningan.

I. Pengujian Parsial (Uji T)

Tabel 7 Hasil Uji Parsial Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	7,703	4,627		1,665	0,099
	TOTAL_MS	-0,095	0,107	-0,067	-0,891	0,375
	TOTAL_KM	0,809	0,212	0,316	3,813	0,000
	TOTAL_TP	0,745	0,128	0,484	5,826	0,000

a. Dependent Variable: TOTAL_KW

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa hasil uji parsial atau uji t dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) memiliki nilai *Sig* sebesar $0.375 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan ini variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Variabel Kewajiban Moral (X_2) memiliki nilai *Sig* sebesar $0.00 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan ini variabel Kewajiban Moral secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X_3) memiliki nilai *Sig* sebesar $0.00 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan ini variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, kewajiban moral dan tingkat pendidikan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Kuningan tahun 2021. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) memiliki nilai *Sig* sebesar $0.375 < 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan ini variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Kuningan. Variabel Kewajiban Moral (X2) memiliki nilai *Sig* sebesar $0.00 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan ini variabel Kewajiban Moral secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Kuningan. Variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X3) memiliki nilai *Sig* sebesar $0.00 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan ini variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Kuningan.

REFERENSI

- Andry, & Amelia, S. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Itc Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124–140.
- Artha, K., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1155–1168. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>
- Darmayasa, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(1), 226–252.
- Dewan Perwakilan Rakyat (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Dipetik: November 25, 2021. Website: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf
- Dewi, A. A. S. I. K., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 84–111.
- Direktorat Jenderal Pajak (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192-pmk-2007. Dipetik: November 25, 2021. Website: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>
- Direktorat Jenderal Pajak (2018). Empat Belas Juli, Awal Sejarah Reformasi Perpajakan. Dipetik: Januari 25, 2022. Website: <https://pajak.go.id/artikel/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- I Putu Gede Diatmika, S. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 10(2).
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Kopong, Y., & Widyaningrum, I., (2016). Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Sunter Jakarta Utara. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan ISSN 2355-9993* 1(2), 95–106.
- Krisna, D., & Kurnia. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pondok Aren Periode 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 112–119.
- Liputan 6. (2021). Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Jadi Kunci Penting Pulihkan APBN. [online]. Retrieved August 21, 2021, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4634796/sri-mulyani-penerimaan-pajak-jadi-kunci-penting-pulihkan-apbn>
- Manalu, D. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1), 105–112.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2018*, Yogyakarta: Andi.
- Oktaviani, R. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Skripsi, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Purba, H., & Sarpingah, S. (2020). The Influence of Gender and Education Level on Taxpayer Compliance (Case Study on Personal Taxpayer at East Tangerang KPP Pratama). *International Journal of Accounting and Finance Studies*, 3(1), p32. <https://doi.org/10.22158/ijafs.v3n1p32>
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Tappayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Rahayu, S.K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sentanu, I. N. W., & Budiarta, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 207–213. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683>
- Sifanuri, H. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran

- Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki Usaha yang Terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto). Skripsi, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method* (Edisi Kedua). Depok: Raja Grafindo Pustaka.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Tologana, E. Y. (2015). Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado). *Jurnal Accountability*, 4(1), 5–24.
- Wahyuni. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 1(2), 1–7.
- Wahyuni, T. (2018). Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 4(4), 81–88.
- Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Kewajiban Moral dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 08(1), 50–57.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *E-Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi Dinastirev* 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Yustina, L. A., Diatmika, P. G., & Yasa, I. N. P. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 10(2).